

kan sebagai tersangka. Dia menyebut saat ini 28 orang masih berstatus sebagai saksi dan 13 sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Ia mengatakan pihaknya masih mendalami pengambilan uang yang dilakukan IO. Yusri belum bisa berbicara banyak terkait tersangka yang di-

Yusri tidak memerinci siapa yang pertama melakukan hal itu. Namun, dia mengatakan cara tersebut berawal dari ketidaksengajaan saat melakukan

nya diberikan gaji pokok. Tidak ada remunerasi (gaji tambahan)," ucap Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin. (Tri/Medcom/J-3)

KOTA DEPOK

Orangtua Siswa Keluhkan Monopoli Seragam

PEMERINTAH Kota Depok mewajibkannya para orangtua siswa membeli seragam batik ke toko penyedia batik yang telah ditunjuk. Hal itu membuat orangtua siswa baik tingkat SD maupun SMP negeri mempertanyakan dan mengeluhkan adanya monopoli pengadaan seragam batik tersebut.

Salah satu orangtua siswa SD negeri di Kota Depok yang enggan disebut namanya mengatakan monopoli pengadaan seragam batik sangat berlebihan. "Penunjukan toko pengadaan seragam batik ini sangat tidak masuk logika. Di zaman modern sekarang ini masih terjadi monopoli," ujarnya, kemarin.

Ia menduga monopoli pengadaan seragam batik khas Kota Depok bagi para siswa SD dan SMP negeri itu untuk tujuan tertentu alias mendapatkan keuntungan besar.

Dari informasi yang ada, SD negeri di Depok berjumlah 287 dengan siswa sekitar 30 ribu orang. SMP negeri ada 6 dengan siswa sekitar 9.000 orang.

Jika dikali Rp80 ribu per satu batik, keuntungan yang diperoleh dari 39.000 siswa lumayan besar.

Dikatakan dia, baru kali pertama ini orangtua siswa diwajibkan membeli seragam batik khas Kota Depok. "Selama ini perintah wajib itu tak pernah terjadi," ujarnya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Kania Purwati berdalih hal itu atas arahan Dinas Pendidikan Kota Depok. "Arahan Disdik yang harus diikuti karena sekolah di bawah Disdik. Saya tanya Pak Kadis dulu," ujarnya singkat.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok M Thamrin mengelak. Menurutnya, orangtua siswa bisa beli sendiri di koperasi yang telah bekerja sama dengan pembatik Kota Depok. Sekolah tidak boleh mengoordinasi seragam batik karena akan ramai.

"Kalau dikoordinasi sekolah, jadi ramai. Kasihan kepala sekolah dan guru jadi bulan-bulanan pihak luar," ujarnya. (KG/J-3)



MI/BARY FATHAHLAH

NUNUNG DIVONIS REHAB: Terdakwa Tri Retno Prayudati atau Nunung (kiri) dan suaminya, July Jan Sambiran, menyimak pembacaan putusan majelis hakim kasus dugaan penyalahgunaan narkoba di PN Jakarta Selatan, kemarin. Majelis hakim memvonis kedua terdakwa harus menjalani rehabilitasi selama 1 tahun 6 bulan di RSKO Cibubur.



PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR, Tbk.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Dua Putra Utama Makmur Tbk berkedudukan di Pati, Jawa Tengah ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Desember 2019
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Pandawa Kantor Pusat PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
Jl. Raya Pati - Juwana KM 7, Dukuh Guyangan, RT 01, RW 05, Purworejo, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119

Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :

Permohonan persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan : Dalam agenda ini, Perseroan meminta persetujuan kepada para pemegang saham untuk dapat menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, dalam hal ini terdapat Direktur dan Komisaris yang mengundurkan diri serta adanya pengangkatan Direktur dan Komisaris Perseroan.

Catatan :

1. Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi dan juga panggilan RUPSLB bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 27 November 2019, pukul 16.00 WIB, dan bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang berhak hadir atau diwakili adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan, di Bursa Efek pada tanggal 27 November 2019.
3. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri lainnya sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum RUPSLB dimulai, yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam RUPSLB dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB, namun suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE"). Surat Kuasa harus sudah diterima Perseroan melalui BAE, yakni PT Raya Saham Registra selambat-lambatnya 30 menit sebelum RUPSLB dimulai.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Cabang Jakarta, pada jam kerja atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPSLB 30 menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 28 November 2019
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
Direksi Perseroan